



BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jl. POM IX Kampus Palembang
Telp. 0711-310633 Fax 0711-319819 Kode Pos 30137**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum	I - 1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	I – 3
1.2.1 Tugas Pokok	I - 3
1.2.2 Fungsi	I - 3
1.2.3 Struktur Organisasi	I - 4
1.3 Dasar Hukum	I - 4
1.4 Maksud dan Tujuan RKT Tahun 2026	I - 6
1.5 Manfaat RKT Tahun 2026	I - 7
1.6 Keterkaitan RPJMD, Renstra	I - 7
1.7 Keterkaitan dengan Anggaran	I - 7
1.8 Sistematika RKT Tahun 2026	I - 8

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2.1 Rencana Stategis (RENSTRA)	II - 1
2.2 Visi dan Misi	II – 2
2.2.1 Pernyataan Visi	II - 2
2.2.2 Pernyataan Misi.....	II - 3
2.3 Isu – isu yang Berpengaruh	II - 4
2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis	II - 15
2.4.1 Tujuan	II – 15
2.5 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	II - 21
2.6 Manajemen Pengelolaan Risiko	II - 24

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

3.1 Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran	III - 1
3.2 Anggaran Kinerja	III - 6

BAB IV PENUTUP

Penutup	IV - 1
---------------	--------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 2.1	Matriks Analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 8
Tabel 2.2	Analisis Faktor Pembentuk Dua Ketidakpastian Utama	II - 10
Tabel 2.3	Hasil Analisa Skenario 1 Foresight.....	II - 12
Tabel 2.4	Hasil Analisa Skenario 2 Foresight	II - 13
Tabel 2.5	Hasil Analisa Skenario 3 Foresight	II - 13
Tabel 2.6	Hasil Analisa Skenario 4 Foresight	II - 14
Tabel 2.7	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026	II - 20
Tabel 2.8	Tabel Pohon Kinerja OPD	II - 21
Tabel 2.9	Sasaran Strategis, IKSS dan Meta Indikator Kinerja Utama	II - 22
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke – 2	III - 1
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	III – 3
Tabel 3.3	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	III - 7

DAFTAR GAMBAR		Halaman
Gambar 2.1	Analisis Foresight.....	II - 10
Gambar 2.2	Balanced Score Card (BSC)	II - 18
Gambar 2.3	Proses Manajemen Risiko	II - 11
Gambar 3.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke – 3	III - 1
Gambar 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	III – 3



PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan program kegiatan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program kegiatan serta sub kegiatan dan kebijakan anggaran dalam Perangkat Daerah yang akan dicapai pada periode tahun berjalan.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan dan indikator kinerja beserta target berdasarkan program kegiatan serta sub kegiatan, arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sementara perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target kinerja dari program kegiatan serta sub kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan tujuan, program, arah kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah target dari capaian indikator kinerja dari outcomes dan output yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah dan makmur, diperlukan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana manivestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka tercapainya visi dan misi penyelenggaraan pemerintah yang baik dan

bersih (*Good and Clean Governance*), yang dicirikan oleh pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel yang mampu menempatkan masyarakat sebagai stakeholder dalam pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melalui kebijakan ini presiden menginstruksikan kepada setiap gubernur, bupati dan kepala instansi/unit kerja di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan membuat:

- a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap awal tahun kerja pada instansi / Unit kerja yang dipimpinnya.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Instansi/Unit Kerja di daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap wajib pajak dalam tahun 2023 akan melaksanakan beberapa kegiatan bidang pengelolaan pendapatan yang didukung oleh dana APBD Provinsi, untuk itu perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2026, agar penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, terukur dan terarah, obyektif dan transparan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas-tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah dan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah lainnya. Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, sistematis dan pencapaian kinerja yang optimal maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Agar dalam

pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan tersebut terarah dan mampu mencapai sasaran dan tujuan maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini memuat rencana capaian atau target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target yang disusun telah menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam Tahun 2026. Melalui penetapan target kinerja di Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026, diharapkan akan menjadi dasar pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja.
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang Perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang – undangan yang berlaku
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
- Pembinaan terhadap UPTB dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Bidang Pajak, membawahi:
 - Subbidang Pajak;
 - Subbidang Pembukuan; dan
 - Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi.
- Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, membawahi:
 - Subbidang Retribusi;
 - Subbidang Penerimaan Pusat; dan
 - Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain.
- Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 - Subbidang Wilayah I;
 - Subbidang Wilayah II; dan
 - Subbidang Wilayah III.
- Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah;
 - Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah; dan
 - Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan.
- Unit Pelaksana Teknis Badan
- Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2045;

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN Nomor 239/IX/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dengan harapan:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih objektif, karena rencana dan target yang telah ditetapkan pada awal tahun kerja.
- b. Dapat memacu kinerja pada Instansi yang dipimpinnya karena setiap unit kerja memiliki beban dan tanggungjawab untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setelah tahun anggaran berakhir dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam komitmen kinerja.

Para pimpinan satuan unit pelayanan/bidang lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dituntut profesional dalam melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan, akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenuhi standar atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu, agar sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.

Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam prakteknya dicapai dengan usaha dari beberapa satuan unit pelayanan/bidang, oleh karena itu, Pimpinan satuan unit pelayanan/bidang harus dibebani tanggung jawab untuk memenuhi target-target kinerja dalam RKT dan diimbangi dengan pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai.

1.5. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja Tahunan 2026 mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Menghubungkan RPJMD, Renstra, Rencana Tindak, maupun Perencanaan Operasional yang terinci;
- b. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran;
- c. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;
- d. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;
- e. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit pelayanan;
- f. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

1.6. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan tujuan jangka menengah, sasaran tahunan, dan indikator kinerja sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja diorganisasi dan kerangka untuk perencanaan kinerja dan rencana anggaran tahunan.

Perencanaan Kinerja yang sumber dananya berasal dari APBD, Kinerja sasarnya menjadi bahan utama dalam menyusun dokumen rencana kerja anggaran, yang pada akhirnya menjadi dokumen Arah dan Kebijakan Umum (KUA dan PPAS) APBD.

1.7. Keterkaitan dengan Anggaran

Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran dan ketersediaan anggaran. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

1.8. Sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bab. I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menjabarkan maksud dan tujuan, manfaat penyusunan dan penyampaian RKT Tahun 2026, keterkaitan Renstra, keterkaitan anggaran serta sistematika RKT.
- Bab. II : Rencana Strategis (RENSTRA), menjelaskan muatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tujuan dan Sasaran Strategis, Isu Strategis, Arah dan Kebijakan serta Strategi.
- Bab. III : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, menjelaskan Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.
- Bab. IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Lampiran I Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2026

Lampiran II Matriks Rencana Kerja Tahun 2026



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (Threat) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Strategis Instansi Pemerintah.

Selain menggunakan analisis SWOT yang menganalisa “Kekurangan dan Kekuatan” serta “Peluang dan Tantangan” terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah ke depan, perlu juga dilakukan analisa *foresight* untuk melihat masa depan Bapenda sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah.

Adapun tujuan dan manfaat dalam analisa *foresight* sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kepercayaan bagi institusi, *foresight* dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri bagi Bapenda dalam membuat kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal;
2. Memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, sehingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder terwujud untuk pengelolaan pendapatan daerah yang transparansi di era transformasi digital;

3. *Foresight* memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam ketidakpastian yang tinggi, hal ini salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak risiko dalam jangka panjang dari kebijakan yang diambil;
4. *Foresight* memberikan evaluasi dari suatu kebijakan yang diambil terhadap program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Metode analisis foresight dengan melihat kondisi “Masa Kini dan Masa Depan” serta “Keinginan dan Kenyataan”.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera selatan mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang mengandung tujuan, sasaran strategis, program kegiatan dan sub kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Rencana Strategis (RENSTRA) bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 053/KPTS/BAPENDA/2025.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1. Pernyataan Visi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 111 bahwa Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJPD dan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dinyatakan dengan visi yang ingin dicapai yaitu, “Sumatera Selatan Mapan Tahun 2045”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat)

misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

2.2.2. Pernyataan Misi

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi yang terdapat pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu "Sumatera Selatan Mapan Tahun 2045".

Selanjutnya misi ke 4 (empat) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Meningkatkan jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).
9. Menempatkan posisi semua *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.
10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.
11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.

12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah.
13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

2.3. Isu-isu yang berpengaruh

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Hasil identifikasi lingkungan strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peluang Eksternal

I. Politik

Kecenderungan politik yang telah dan sedang berkembang yang akan memberikan peluang:

1. Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan kemandirian fiskal daerah khususnya dalam memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumsel yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang menjadi potensi pendapatan daerah.

II. Ekonomi

Perkembangan bidang ekonomi yang turut memberikan peluang dengan adanya kontribusi positif dan situasi kondusif adalah:

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat dan mengalami laju pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.
2. Potensi Sumber Daya Alam dan peluang investasi yang besar dan belum dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah umumnya dan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

III. Sosial

Beberapa trend sosial yang terjadi dimasyarakat memberikan peluang antara lain:

1. Masyarakat yang sudah melek teknologi menjadikan sosial media untuk tempat sosialisasi pelayanan pajak maupun peraturan-peraturan yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*.
2. Menguatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan *clean government* dan *good governance* disertai dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik sebagai kompensasi atas kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

IV. Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menawarkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengelolaan data dan arus informasi.

V. Kolaborator dan Kompetitor.

1. Adanya delegasi kewenangan di antara badan-badan unit pengelola pajak dan retribusi daerah sehingga dapat memecahkan masalah antara Bapenda sebagai koordinator penerimaan pendapatan daerah.
2. Terdapat 15 Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
3. Terdapat BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal).
5. Makin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun media massa dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

b. Ancaman Eksternal

I. Ekonomi

1. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol Non BG, yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel.
2. Tidak Stabilnya Harga Komoditas Utama Sumatera Selatan Terutama Sektor Perkebunan yang berpengaruh langsung pada pendapatan masyarakat Sumatera Selatan;
3. Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui show room tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II);
4. Adanya pengaruh resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan:
 - Gejolak perekonomian global sehingga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal;
 - Tunggakan pajak yang diakibatkan penarikan *dealer*/penyedia kredit terhadap kendaraan bermotor;
 - Penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

II. Sosial

Masih adanya penolakan wajib pajak/wajib retribusi daerah.

III. Teknologi

1. Belum optimalnya transfer informasi dan teknologi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
2. Kemampuan *utilities* teknologi masih rendah

IV. Kolaborator

Belum optimalnya koordinasi upaya pencapaian target pendapatan daerah dari masing-masing pihak.

c. Kekuatan Internal

1. Kebijakan pemutihan pajak;
2. Kebijakan penetapan pajak progressif;
3. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel;
4. Memiliki tujuan dan sasaran strategis yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan;

7. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai;
8. Terdapat 30 UPTB yang tersebar di 17 Kabupaten/kota;
9. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak dan non pajak;
10. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait;
11. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.

a. Kelemahan Internal

1. Pelayanan pembayaran pajak belum optimal dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis Informasi Teknologi;
2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak;
4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan;
5. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS;
6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar;
7. Rendahnya kemampuan utilities teknologi;
8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB;
9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal;
10. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.

Adapun analisa matrik SWOT yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel. 2.1

Matriks Analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

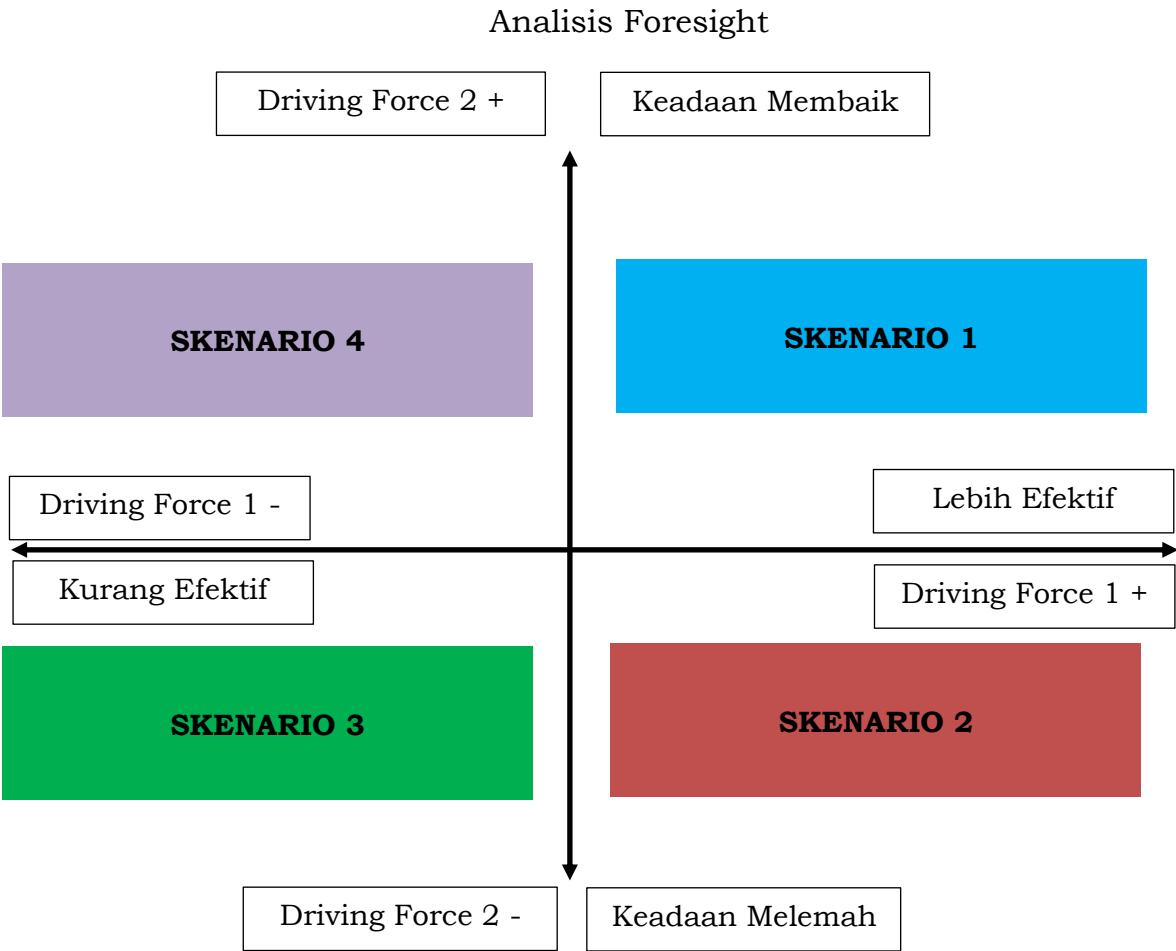
FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang memberikan otonomi kepada daerah; 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD; 3. Reformasi di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022; 4. Perda Prov. Sumsel No. 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Prov. Sumsel; 5. Komitmen Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah; 6. Potensi Sumber Daya Alam dan pariwisata yang besar; 7. Perkembangan teknologi informasi yang pesat; 8. Perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat; 9. Terdapat 15 Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah; 10. Terdapat BUMN dan BUMD di wilayah Prov. Sumsel; 11. Kebijakan Pemutihan Pajak; 12. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal); 13. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Prov. Sumsel; 14. Terdapat kebijakan Kementerian Keuangan tentang PMK.	TANTANGAN (THREATS) 1. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol non-BG yang beroperasi di wilayah Prov. Sumsel; 2. Pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal; 3. Adanya kebijakan Bank Indonesia tentang batasan minimal uang muka (DP) untuk pengambilan kredit kendaraan bermotor; 4. Belum optimalnya kontribusi/sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BUMN maupun BUMS kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 5. Perkembangan BUMD belum menggembirakan sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kecil; 6. Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui <i>show room</i> tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II); 7. Adanya pengaruh resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang belum stabil; 8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak; 9. Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan Pendapatan Daerah).
KEKUATAN (STRENGHT) : 1. Kebijakan penetapan pajak progressif; 2. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel; 3. Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah; 4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 5. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan; 6. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai; 7. Terdapat 30 UPTB yang tersebar di 17 Kabupaten/kota; 8. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak dan non pajak; 9. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait; 10. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang 1. Reformasi birokrasi organisasi; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui upaya perbaikan mutu pelayanan.	Strategi WO Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang 1. Peningkatan kualitas SDM melalui upaya pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan; 2. Meningkatkan disiplin pegawai melalui pendekatan formal dan informal.
KELEMAHAN (WEAKNESSES) : 1. Pelayanan pembayaran pajak belum menggunakan sistem informasi komputerisasi berbasis teknologi; 2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak; 3. Kurangnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak; 4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan; 5. Kurangnya penerapan disiplin PNS; 6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar; 7. Rendahnya kemampuan <i>utiliez</i> teknologi; 8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB; 9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal; 10. Belum pernah dilakukan kajian kepuasan pelanggan; 11. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Meningkatkan penerimaan bagian Dana Perimbangan; 3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	Strategi WT Meminimalkan Kelemahan untuk menghindari ancaman. 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana organisasi.

Berdasarkan analisis kritikal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
3. Usulan perubahan regulasi dari Dana Perimbangan, terutama Dana Bagi Hasil pengelolaan Sumber Daya Alam secara lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil migas;
4. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
5. Peningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
6. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
7. Peningkatkan daya dukung sarana prasarana;
8. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
9. Peningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Metode analisis foresight dengan melihat kondisi "Masa Kini dan Masa Depan" serta "Keinginan dan Kenyataan" seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.1



Dari skema gambar 3.1 dan 3.2 tersebut diatas, terbentuk 4 (empat) kuadran yang menggambarkan kondisi “respons pemerintah daerah terhadap kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022” yang mewakili aspek-aspek pengambilan kebijakan dan tingkat kolaborasi dalam situasi pemulihan ekonomi dan penetrasi inflasi daerah. Respons pemerintah daerah ini membentuk sumbu horizontal yaitu [1]. Lebih efektif dan [2]. Kurang efektif. Kemudian 5 (lima) faktor yang mewakili respon pemerintah daerah yaitu:

1. Kebijakan Kapasitas Fiskal Daerah;
2. Program Pemerintah Daerah yang memastikan Penerimaan Pendapatan Daerah tercapai atau melampaui target;
3. Kebijakan Pemulihan Ekonomi;
4. Kerjasama antar institusi (*cross cutting*) dengan Bapenda termasuk Pemerintah Pusat;
5. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta.

Sementara sumbu vertikal membentuk “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan” yaitu [1]. Keadaan membaik; [2]. Keadaan melemah. Empat faktor yang dapat mewakili “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Daya saing daerah;
2. Harga komoditas relatif stabil;
3. Laju inflasi terkendali;
4. Pendapatan income perkapita.

Berikut disajikan tabel hasil analisis *foresight* sebagai gambaran untuk mengeliminasi “ketidakpastian” utama yang mungkin bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tugas dan fungsi Bapenda periode tahun 2025 – 2029:

Tabel 2.2

Analisis Faktor Pembentuk Dua Ketidakpastian Utama

Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	
Sasaran Strategis	:	1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
		2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
		3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD
		4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
		5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Respons Pemerintah Daerah terhadap kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022			
Kurang Efektif (<i>do nothing</i>)		Lebih Efektif (<i>do something</i>)	
1.	Kebijakan kapasitas fiskal daerah kurang bisa merespon	1.	Kebijakan kapasitas fiskal daerah lebih cepat merespon
2.	Program kegiatan sub kegiatan Kepmendagri 900.1.2850 tahun 2025 kurang adaaktif	2.	Program kegiatan sub kegiatan Kepmendagri 900.1.2850 tahun 2025 lebih adaaktif
3.	Kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 kurang efektif	3.	Kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 lebih efektif
4.	Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) kurang efektif	4.	Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) lebih efektif
5.	Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta kurang efektif	5.	Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta lebih efektif
Tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan			
Keadaan Melemah (<i>do nothing</i>)		Keadaan Membaik (<i>do something</i>)	
1.	Daya saing daerah yang rendah	1.	Daya saing daerah yang membaik
2.	Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan tidak terkendali	2.	Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan relative stabil
3.	Laju inflasi daerah masih tinggi	3.	Laju inflasi daerah yang terkendali
4.	Pendapatan income per kapita masih rendah	4.	Pendapatan income per kapita membaik

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025

Terhadap empat skenario yang dihasilkan pada sumbu vertikal dan horizontal telah digambarkan sebagaimana pada gambar 2.2 merupakan prediksi gambaran yang akan pada Bapenda selama kurun waktu periode 2024 – 2026. Setiap skenario memberikan gambaran pada Bapenda tahun 2024 – 2026 pada sektor sebagai berikut : [1]. Kapasitas SDM; [2]. Produktivitas Aset; [3]. Kelembagaan; [4]. Pertumbuhan Pendapatan Daerah; [5]. Potensi Retribusi Yang Digali, maka disimpulkan ada 4 (empat) skenario dengan implikasinya sebagai berikut:

1. Skenario 1 (kuadran I) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)

Tabel 2.3
Hasil Analisa Skenario 1 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 1: Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 86 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 86 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 25 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untukantisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Penambahan kantor layanan samsat
		d.	Terbentuknya otoritas pengadilan pajak di Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 8,33 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025

2. Skenario 2 (kuadran II) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel 2.4

Hasil Analisa Skenario 2 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 2: Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025

3. Skenario 3 (kuadran III) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel 2.5

Hasil Analisa Skenario 3 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 3: Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi

			% terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Tidak terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025

4. Skenario 4 (kuadran IV) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)

Tabel 2.6
Hasil Analisa Skenario 4 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 4: Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 15 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT

		c.	Terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 6,24 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Sebagian besar kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Mulai diberlakukannya pemanfaatan platform digitalisasi

2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.4.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPJMD.

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 – 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Dokumen RPJMD dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah “Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah”

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2030 mencapai nilai indeks 2,074

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific,

measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2020 - 2024 serta menjabarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan Renstra ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 (SS.1) : Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD;
- b. Meningkatkan kontribusi pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) dalam APBD;
- c. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. Agar daerah lebih kreatif dan inovasi dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada menjadi kekuatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan;
- e. Mengurangi ketergantungan dana transfer pusat sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Sasaran Strategis 2 (SS.2): Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatnya kemandirian daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah
- b. Memenuhi kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat

3. Sasaran Strategis 3 (SS.3): Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kemandirian sumber PAD dalam belanja dan pembiayaan daerah
- b. Memperkuat pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pilar utama dalam APBD
- c. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

4. Sasaran Strategis 4 (SS.4): Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kekuatan pajak daerah;;
- b. Meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB;

5. Sasaran Strategis 5 (SS.5): Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan potensi penerimaan yang digali menjadi sumber pendapatan daerah;

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective and learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*revenue mobilization*)
- IKSS 2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

2. *Customer Perspective*

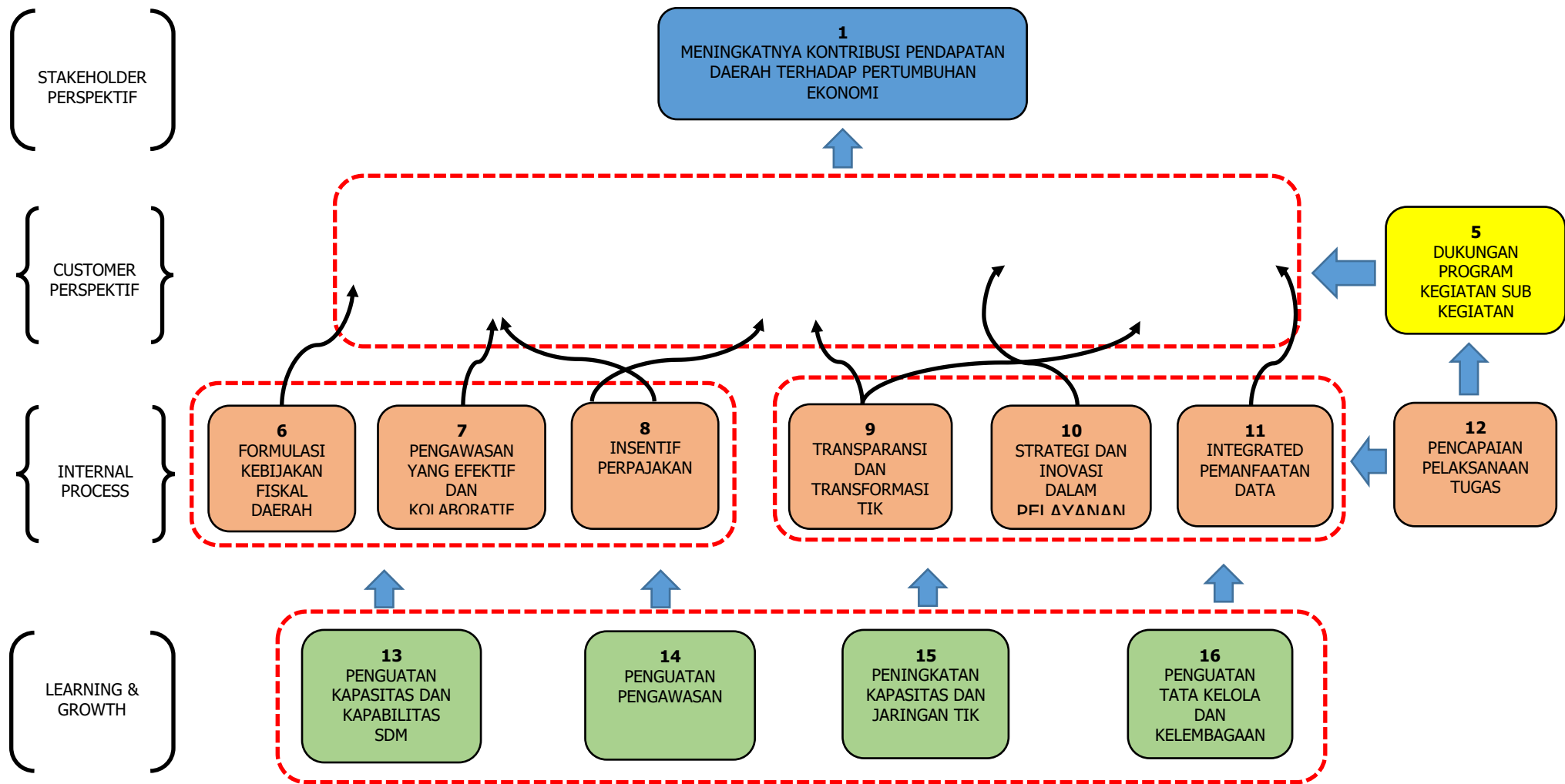
Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 3 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;

3. *Internal Process Perspektive and Learning and Growth Perspektive*

Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 4 Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD
- IKSS 5 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah



Gambar 2.2
Balanced Score Card (BSC)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dan pedoman Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah dalam tiga tahun kedepan adalah:



Tabel 2.7

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,89	1,95	2,02	2,09	2,15	2,21	2,28	
		Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	<i>Revenue Mobilization</i> Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	4,00	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,429	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,21	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	
		Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*)	1,02	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1.25	
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	
		Meningkatnya Pendapatan	Persentase Realisasi	101,46	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	



		Daerah	Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**)								
		Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas**)	0,88	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	
			Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah**)	1,08	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	

1.5. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kineja (pohon kinerja lengkap terlampir dalam dokumen Renstra) sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tabel Pohon Kinerja OPD

Misi 2		:	Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat			
Tujuan Misi 2		:	Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah			
Sasaran		:	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah			
Tujuan OPD		:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah			
Indikator Tujuan		:	Indeks kapasitas fiskal daerah	:	2,28 Indeks	
Sasaran Strategis			Intermediate Outcome Level 1	Intermediate Outcome Level 2	Intermediate Outcome Level 3	Intermediate Outcome Level 4
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Meningkatnya penerimaan sektor pajak daerah		Terupdatenya data potensi pajak daerah	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Meningkatnya Frekuensi Pelaksanaan Razia
				Meningkatnya nilai ketertagihan piutang pajak	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Meningkatnya Pendaftaran Pajak Baru
				Meningkatnya akses layanan wajib pajak	Meningkatnya Aplikasi Berbasis Informasi Teknologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Menurunnya tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah		Pengawasan internal yang baik	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Standart Operasional Prosedure
		Meningkatnya penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain		Meningkatnya kontribusi perusahaan yang mendapatkan penyertaan modal	Meningkatnya Objek Retribusi Daerah	Meningkatnya Pengawasan Pendapatan Retribusi

			Bertambahnya Jenis Retribusi	Meningkatnya pendaftaran objek retribusi baru	Meningkatnya kerjasama dengan pihak ketiga
		Meningkatnya standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kapasitas jaringan pelayanan TIK	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Meningkatnya Aplikasi Berbasis Informasi Teknologi
			Meningkatnya inovasi layanan berbasis TIK	Meningkatnya Pemenuhan Kanalisasi	Meningkatnya Kelaikan Keamanan Informasi
2.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Meningkatnya Diversifikasi Sumber Pendapatan	Meningkatnya Jasa Ekosistem Ekonomi Digital	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pajak	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi
			Meningkatnya Deviden Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BLUD	Meningkatnya Pengembangan Usaha dengan Sektor Swasta
			Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya Perluasan Basis Pajak Daerah	Meningkatnya Penguatan Data Pajak per Wilayah Kelurahan atau Pedesaan
		Berkurangnya Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Horizontal	Meningkatnya Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Penguatan Dana Insentif Daerah	Proporsi Rasio Anggaran Perpajakan Daerah Meningkat
			Meningkatnya Inovasi Pendanaan Alternatif	Meningkatkan peran <i>Public Private Partnership</i>	Meningkatnya Layanan Publik yang baik
		Meningkatnya Kapasitas Good Governance	Kapasitas Kelembagaan yang baik	Restrukturisasi Kelembagaan Berdasarkan Fungsi	Meningkatnya SDM Penyuluh Pajak Daerah
			Peningkatan penetapan Zona Integrasi Pajak	Berkurangnya Kebocoran Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Penerimaan Pajak
3.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Penguatan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak
		Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Insentif Fiskal Daerah	Pengurangan Tarif Pajak Daerah
		Meningkatnya Sinergi Opsen Pajak Daerah	Meningkatnya Perluasan Titik Layanan Pajak Daerah	Meningkatnya Kerjasama Dengan BUMDes	Meningkatnya Rasio Titik Layanan terhadap Cakupan Wilayah Pelayanan

		Meningkatnya Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya Pembinaan Internal Petugas	Meningkatnya Kompetensi Petugas	Berkurangnya Pemberian Punishment Petugas
		Meningkatnya Cakupan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya Penetapan Pajak Daerah	Meningkatnya Objek Pajak Daerah	Meningkatnya Integrasi Objek Pajak dengan Data Investasi Daerah
			Meningkatnya Pemungutan Pajak Daerah	Meningkatnya Elektronikasi Pembayaran Pajak Daerah	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah
			Meningkatnya Pengendalian Sistem Berbasis Teknologi	Meningkatnya Infrastruktur SPBE	Meningkatnya Level Survailens ISO TIK
4.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pengawasan Pendapatan Retribusi	Meningkatnya Objek Retribusi Daerah
			Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
			Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Meningkatnya Kerjasama SWDKLLJ	Meningkatnya Operasi Gabungan Bersama Pembina Samsat
5.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Deregulasi Kebijakan Potensi Pendapatan Daerah	Meningkatnya Supremasi Penegakan Hukum	Meningkatnya sosialisasi dan edukasi
			Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	Meningkatnya Konsolidasi Fiskal Antar Daerah
			Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Inklusi Pembayaran Pajak Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pada Platfom Digitalisasi
	Program Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun				

	2025 sebagai berikut:		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		

Tabel 2.9

Sasaran Strategis, IKSS dan Meta Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		FORMULASI	META INDIKATOR
SS. 1	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	IKSS. 1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (revenue mobilization)	$\left(\frac{[Nilai\ absolut\ dari\ total\ PAD\ dalam\ realisasi]}{Total\ PAD\ dalam\ APBD} - 1 \right) \times 100 \%$ Dimana : PAD = realisasi PAD tahun ke n APBD = APBD Induk tahun ke n	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.

SS. 2	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	IKSS. 2	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$\left(\frac{Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH} \right)$	IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal Tr_{GP} adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) Tr_{SP} adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) B adalah <i>Subnational Borrowing</i> (Penerimaan Pinjaman Daerah) REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan REV_{OR} adalah
----------	--	------------	----------------------------------	---	--

					Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
SS. 3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	IKSS. 3	Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100$ Dimana : Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)	Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan
SS. 4	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	IKSS. 4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	$\left(\frac{[Pajak\ Daerah]}{Total\ PDRB} \right) \times 100\ %$ Dimana : Pajak Daerah : realisasi pajak daerah PDRB : Produk Domestik Regional Bruto	Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota

						PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)
SS. 5	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	IKSS. 5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\left(\frac{[Pendapatan Asli Daerah]}{Pendapatan Daerah} \right) \times 100 \%$ Dimana : PAD : realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah : realisasi pendapatan daerah	Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun	

						pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
--	--	--	--	--	--	--

1.6. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		IKU	2,02
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)		IKU	6,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah		IKU	0,458
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD		IKU	1,28
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		IKU	1,252
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		IKU	49,89
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,21
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,98
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,18

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
-----	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	Indikator Kinerja Outcomes	1,73 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	14,81 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Indikator Kinerja Outcomes	5,02 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	95,43 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,78 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,93 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,83 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,91 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	16,85 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	12,74 %

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	82,19 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,81 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,62 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

--	--	--	--	--

e. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,96 %
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	4,92 %
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,92 %

f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,67 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,54 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	79,21 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,78 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Meningkatnya Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

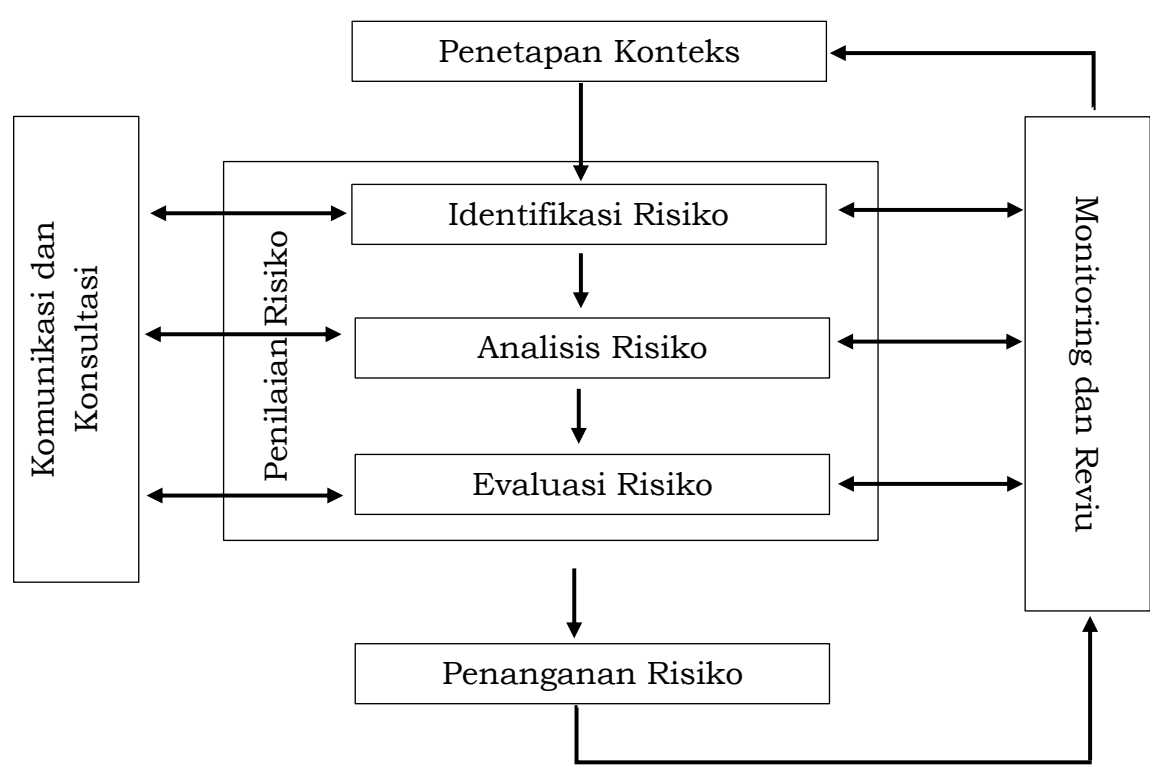
g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	8,62 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,60 %

1.7. Manajemen Pengelolaan Risiko

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sementara manajemen risiko merupakan budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan,

prosedure dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan reviu, sehingga proses dimaksud digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3

Proses Manajemen Risiko

Terhadap tujuan dan sasaran strategis Bapenda yang telah dibahas pada Bab 2.1, adapun rumusan identifikasi risiko yang akan direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Risiko Strategis (RSO), Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan dan sasaran strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan identifikasi Risiko Strategis (RSO) sebagai berikut:
 - a. Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya) –

Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD;

- b. Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait;
- c. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD;
- d. Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD;
- e. Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD;
- f. Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi.

Dalam konteks identifikasi risiko strategis OPD, maka berikut hasil identifikasi Bapenda sebagai berikut:

- 1. Tidak tercapainya pendapatan daerah dari target;
 - 2. Rendahnya kontribusi PAD terhadap PDRB;
 - 3. Tidak tercapainya kemandirian daerah dalam pembangunan yang bersumber pada PAD (revenue mobilization)
2. Risiko Operasional (ROO), identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD sebagai berikut:
- b. Banyaknya tunggakan pajak dari wajib pajak;
 - c. Tidak optimalnya pungutan pajak daerah;
 - d. Tidak tercapainya retribusi daerah dari target;
 - e. Tidak optimalnya pengelolaan pendapatan daerah;
 - f. Masih terdapat tindak pelanggaran;
 - g. Terhambatnya pelayanan pajak kepada wajib pajak;
 - h. Analisis jabatan dan analisis beban kerja SDM samsat belum merata;
 - i. Terdapat deviasi (-) daya serap anggaran dari rencana target SPD.



RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran

Implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 untuk mencapai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026. Untuk menunjang pencapaian sasaran tersebut didukung anggaran sebesar Rp. 225.667.956.012,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 meliputi tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran diuraikan sebagai berikut:

Tujuan dari Misi Kedua	Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah
------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan dari misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-2

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
	Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	IKU	2,02
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	IKU	6,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	IKU	0,458

3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	IKU	1,28
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	IKU	1,252
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	IKU	49,89
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IKU	92,21
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1. Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,98
		2. Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,18

Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 maka akan dilaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang disediakan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang disediakan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum yang disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah yg dilaksanakan
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan PAD
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3.2. Anggaran Kinerja

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam mendukung kinerja adalah sebesar Rp. 225.667.956.012,00. Kerangka pendanaan tersebut guna mendukung 3 Program, 11 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan yang telah direncanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026.

Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
I	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	95%	257.156.929.169
1	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	80%	218.600.000
1.1	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	73.000.000
1.2	5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	73.000.000
1.7	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	72.600.000
2	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	93%	165.329.148.028
2.1	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	423 orang	165.009.908.028
2.2	5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	199.240.000
2.7	5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	120.000.000
3	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan BMD	87%	25.200.000

3.6	5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.200.000
4	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	91%	288.400.000
4.4	5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	102.000.000
4.5	5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 dokumen	144.000.000
4.7	5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	42.400.000
5	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	85%	682.800.000
5.4	5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	16.800.000
5.9	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	372.800.000
5.10	5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	200 orang	293.200.000
6	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	70%	18.264.606.580
6.1	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	390.069.080
6.2	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	650.000.000
6.3	5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	250.000.000
6.4	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1.130.337.500
6.5	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	7.300.000.000
6.6	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	3 dokumen	32.000.000

6.8	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	100.800.000
6.9	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	640.000.000
6.11	5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	7.771.400.000
7	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	64%	1.400.000.000
7.5	5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1.000.000.000
7.8	5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 dokumen	400.000.000
8	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	78%	27.778.683.402
8.1	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.800.000
8.2	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.659.234.198
8.3	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	198.800.000
8.4	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	24.883.849.204
9	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	71%	5.587.134.082
9.1	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 unit	2.307.134.082
9.2	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	1.630.000.000
9.6	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	300.000.000

9.10	5.02.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	2 unit	1.350.000.000
II	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95%	120.800.000
2	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	66%	120.800.000
2.10	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3 Laporan	120.800.000
III	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-5% s/d 5%	9.956.064.300
3	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase SOP pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	85%	9.956.064.300
3.1	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	548.800.000
3.2	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	342.700.000
3.3	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 laporan	2.106.800.000
3.5	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 laporan	510.000.000
3.6	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 laporan	98.500.000
3.7	5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	70.000.000
3.8	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 laporan	546.003.720
3.9	5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 dokumen	40.000.000
3.10	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	29 dokumen	1.422.980.200

3.11	5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 dokumen	20.000.000
3.12	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	2 Dokumen	186.600.000
3.13	5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	29 Laporan	20.000.000
3.14	5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	60.200.000
Jumlah					225.667.956.012

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, langkah / upaya-upaya yang dilaksanakan yaitu meliputi:

1. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Pajak Daerah antara lain:

- Melaksanakan Rekonsiliasi Pajak Daerah.
- Melaksanakan Rekonsiliasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
- Pertukaran data terkait penerimaan pendapatan daerah.
- Merintis pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal.
- Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja antara lain; Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor, Desnet sebagai pihak ketiga di bidang IT, KPK, BPK dll.
- Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi.
- Membenahi dan memantapkan system dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah.
- Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak Daerah:

- Menambah kapasitas dan kecepatan Bandwith internet up to 100 MBPs
- Mengoperasikan 21 unit kendaraan Samsat keliling
- Mengoperasikan pelayanan Samsat Drive Thru sebanyak 1 unit

- Mengoperasionalkan pelayanan Samsat Corner di PIM Mall Palembang, PS Mall Palembang dan Lippo Plaza Lubuk Linggau
- Mengoperasionalkan pelayanan Samsat Desa di OKU Selatan
- Pengadaan komputer unit dan komputer jaringan untuk upgrading hardware
- Pelayanan informasi pajak berbasis IT antara lain e-Dempo, SOS Samsat, e-Signal, e-Commerce, penggunaan aplikasi Signal, pembayaran cashless, penggunaan back up data cloud server, penggunaan aplikasi berbasis web, penggunaan digitalisasi tax
- Pemeliharaan gedung kesamsatan untuk ruang tunggu yang representative
- Meningkatkan Kenyamanan ruang tunggu di samsat dengan pojok bacaan, ruang bermain anak serta ruang laktasi
- Penyediaan snack corner



PENUTUP

Terwujudnya pencapaian perencanaan kinerja dalam hal ini Rencana Kerja Tahunan merupakan tujuan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Proses pencapaian target dalam Rencana Kinerja Tahunan perlu di pantau secara rutin dan teratur sehingga target dapat diprediksi dan dievaluasi sedini mungkin selama evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apabila target yang ingin dicapai masih relevan dengan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam melaksanakan visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 21 Januari 2026



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

LAMPIRAN

A. Lampiran I Rencana Kinerja Tahunan

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN [Rp]
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dok	29	1.422.980.200
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	Nilai	84,07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	%	80,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	1	72.600.000
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,458	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	98.500.000
Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	%	1,28	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	%	95,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	%	66,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	3	120.800.000
Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap	Rasio	1,252	Program Pengelolaan Pendapatan	Deviasi Realisasi Realisasi PAD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Persentase pengelolaan pendapatan	%	85,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	Laporan	3	2.106.800.000

terhadap PDRB	PDRB			Daerah	terhadap Anggaran PAD dalam APBD			Daerah	n yang terselesaikan			Pajak Daerah	Kebijakan Pajak Daerah			
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	49,89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapataan daerah	%	91,00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	144.000.000
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapataan daerah	%	91,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dok	1	102.000.000
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,98	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapataan yang terselesaikan	%	85,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	1	548.800.000
	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapataan yang terselesaikan	%	85,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	1	342.700.000

B. Lampiran II Rencana Kinerja Tahunan

SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN [Rp]
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	%	1,73	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	3	2.106.800.000
Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,81	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	510.000.000
Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,02	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dok	29	1.422.980.200
Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dok	12	40.000.000

Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Rasio	95,43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	%	91,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	42.400.000
Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	%	91,00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	144.000.000
Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,93	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	%	95,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	%	66,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	3	120.800.000
Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	%	91,00	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dok	1	102.000.000
Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Nilai	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Dok	2	186.600.000
Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,91	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	Laporan	29	20.000.000
Berkurangnya	Persentase	%	16,85	Program	Deviasi	%	6,00	Kegiatan	Persentase	%	85,00	Pembinaan dan	Jumlah Laporan	Laporan	29	20.000.000

Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD			Pengelolaan Pendapatan Daerah	pengelolaan pendapatan yang terselesaikan			Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah			
Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,74	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Dok	2	186.600.000
Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	82,19	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dok	1	548.800.000
Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,81	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	1	342.700.000
Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,62	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	1	342.700.000
Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan	Persentase Meningkatnya Peraturan	%	100	Program Pengelolaan Pendapatan	Deviasi Realisasi Realisasi	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Persentase pengelolaan	%	85,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan	Dok	1	342.700.000

Sumber Potensi	yang Diharmonisasi			Daerah	PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD			Daerah	pendapatan yang terselesaikan			serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kebijakan Pajak Daerah			
Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	%	93,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	120.000.000
	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	4,92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	%	80	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	73.000.000
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	73.000.000
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	72.600.000
	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan	%	80,92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	%	85,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	372.800.000

	Daerah															
												Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	200	293.200.000
Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	%	70,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	1	7.771.400.000
Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,54	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dok	1	342.700.000
Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	79,21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	%	70,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	1	7.771.400.000
Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	%	95,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	%	70,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	1	7.771.400.000
Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat	%	95,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan	%	70,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dok	1	7.771.400.000

				Provinsi	Daerah				perkantoran			Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD			
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	2	546.003.720
Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,62	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dok	29	1.422.980.200
Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,60	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	%	85,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dok	1	70.000.000

Palembang, 09 Februari 2026



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001



Copyright 2026, Rencana Kinerja Tahunan 2026

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jalan POM IX Kampus – Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telpon : 0711 – 310633

Email : bapendasumateraselatan@gmail.com